



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

[SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022](#)

**Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang**  
**Melalui Program Ketenagakerjaan *Specified Skilled Workers*.**

Skripsi

Oleh

Michael Pradipta Nawa Aji

6091801201

**Bandung**

2023



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

[SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022](#)

**Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang**  
**Melalui Program Ketenagakerjaan *Specified Skilled Workers*.**

Skripsi

Oleh

Michael Pradipta Nawa Aji

6091801201

Pembimbing

Sylvia Yazı S.IP., MPPM., PH.D.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Michael Pradipta Nawa Aji  
Nomor Pokok : 6091801201  
Judul : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang Melalui Program Ketenagakerjaan *Specified Skilled Workers*.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 14 Juli 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt.

: 

**Sekretaris**

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D

: 

**Anggota**

Yulia Indrawati, Ph.D

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Michael Pradipta Nawa Aji  
NPM : 6091801201  
Jurusan / Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang  
Melalui Program Ketenagakerjaan *Specified Skilled Workers*.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidh penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Juni 2023



Michael Pradipta Nawa Aji

## ABSTRACT

Nama : Michael Pradipta Nawa Aji

NPM : 6091801169

Judul : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang Melalui Program Ketenagakerjaan *Specified Skilled Workers*.

Jepang mengalami sebuah fenomena demografi menua yang juga dibarengi dengan semakin kecilnya jumlah tenaga kerja mereka di dalam ekonomi mereka. Penurunan jumlah tenaga kerja ini menjadi salah satu isu penting yang dikedepankan untuk diatasi karena pengaruhnya yang cukup besar dalam keberlangsungan ekonomi Jepang dalam jangka waktu yang akan mendatang. Salah satu cara yang diambil oleh pemerintah Jepang adalah membentuk sebuah kebijakan yang akan memperbolehkan tenaga kerja asing dengan kemampuan tertentu agar dapat masuk mengisi kekosongan tenaga kerja di berbagai industri yang membutuhkan tenaga kerja. Pada tahun 2019, Jepang mengeluarkan kebijakan tersebut dan menamai program tersebut sebagai *Specified Skilled Workers programme* (SSW). Sebuah program ketenagakerjaan yang akan memperbolehkan lebih dari 360.000 tenaga kerja asing untuk bekerja di 12 sektor industri Jepang. Program ini sendiri menjadi penerus dari program magang yang sebelumnya dijalankan oleh Jepang bernama *Technical Intern Training Programme* (TITP). Pembuatan program ini sendiri menciptakan beberapa pertanyaan mengenai keetisan dan komitmen Jepang dalam menjaga kesejahteraan para tenaga kerja asing yang akan bekerja dan hidup di Jepang.

Penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan program SSW dan apakah program SSW ini mempunyai regulasi kesejahteraan yang lebih baik dari program TITP. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Penulis akan menggunakan Konsep *Institutional Change* dengan matrix *Processes and Results* untuk dapat seberapa besar peningkatan kesejahteraan tenaga kerja asing dalam program SSW. Berdasarkan analisa program SSW berada di fase *Incremental Continuity* yang artinya benar SSW memberikan peningkatan kesejahteraan dibanding TITP namun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan respon yang tidak besar dari tenaga kerja asing dengan pendaftaran dan pengiriman yang diluar target, serta tidak ada respon penolakan dari tenaga kerja lokal dan masyarakat. Ini menjadi penguat bahwa SSW dianggap tidak berbeda banyak dengan TITP dalam menawarkan program kesejahteraan tenaga kerja asing.

**Kata Kunci:** *Specified Skilled Workers*, Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing, Imigrasi, Kebijakan Luar Negeri, Ekonomi

## **ABSTRACT**

Nama: Michael Pradipta Nawa Aji

NPM: 6091801169

Judul: Enhancing the Welfare of Foreign Workers in Japan through the Specified Skilled Workers Employment Program.

Japan is facing the challenge of an aging population, accompanied by a decreasing workforce within their economy. The decline in the workforce has become a significant issue that needs to be addressed due to its substantial impact on Japan's future economic sustainability. One approach taken by the Japanese government is to formulate a policy that allows foreign workers with specific skills to fill the labor gaps in various industries. In 2019, Japan issued this policy and named it the Specified Skilled Workers program (SSW), a labor employment program that allows over 360,000 foreign workers to work in 12 sectors of the Japanese industry. This program serves as a successor to the previous internship program known as the Technical Intern Training Program (TITP) implemented by Japan. The creation of this program raises questions regarding Japan's fairness and commitment to ensuring the welfare of foreign workers who will work and live in Japan.

This research will discuss the aspects and compared the SSW program and whether it has better welfare regulations compared to the TITP program. To answer this question, the author will utilize the concept of Institutional Change with the Processes and Results matrix to assess the extent of improvement in the welfare of foreign workers under the SSW program. Through the analysis, it is determined that the SSW program falls under the Incremental Continuity phase, which means that it provides some improvement in welfare compared to TITP, but not significant. This is due to the relatively low response from foreign workers in terms of registration and recruitment, as well as the absence of rejection from local workers and society. These findings reinforce the notion that SSW is not significantly different from TITP in terms of offering welfare programs for foreign workers.

Keywords: Specified Skilled Workers, Employment, Foreign Workers, Immigration, Foreign Policy, Economy.

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Seizin-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Program Ketenagakerjaan *Specified Skilled Workers* Jepang Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang.” dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan Program Sarajan penulis di Prograsm Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak yang memberikan penulis berbagai bentuk bimbingan, arahan serta dukungan. Oleh karena itu penulis inign mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada dallam penulisan skripsi ini. Penulis juga terbuka terhadap segala bentuk kritik dan juga saran yang ditujukan untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat, terkhususnya bagi penelitian-penelitian terkait kebijakan ekonomi lainnya.

Bandung, 23 Juni 2021



Michael Pradipta Nawa Aji

## Ucapan Terima Kasih

1. Tuhan Yesus Kristus. Tanpa berkat dan petunjuk yang diberikannya kepada Penulis, kemungkinan besar skripsi ini tidak akan rampung.
2. Terima Kasih yang paling besar dan penuh kasih sayang kepada Mama penulis yang telah sabar dan terus memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini. Terimakasih atas segala doa yang mama panjatkan setiap hari, pagi hingga malam hari. *You're the only reason why I can finish this*. Juga untuk hewan peliharaan saya, Dipsy Red Poodle yang menemani saya setiap hari dan menjadi sumber kebahagiaan terdekat bagi penulis.
3. Teruntuk Mba Sylvia Yazid, terim kasih sebesar-besarnya telah mau menjadi dosen pembimbing saya. Maaf apabila penulis hilang-hilangan dan molor dari waktu yang semestinya. Tetapi Mba Syl tetap mau membantu dan juga memberikan pandangan serta ilmu, materi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih banyak Mba Syl.
4. Kepada seluruh dosen dan tenaga pengajar Universitas Katolik Parahyangan berkat ilmu dan juga kesempatan yang berharga bagi penulis untuk menjadi bagian dari salah satu kampus terbaik di Indonesia.
5. Banyak Terimakasih untuk Vianny yang selalu mau mengingatkan, membantu dan menemani penulis disituasi apapun. Terimakasih karena sudah mau menjadi orang yang *approach* penulis di saat penulis sedang terpuruk dan mau memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih sudah mau menemani penulis nonton berbagai konser dan juga rival berenang. Terimakasih Adinda telah menjadi tempat mengeluh dan *sharing* lagu. Terimakasih untuk selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi.
6. Kepada teman delegasi Tiongkok penulis, Alfred Radja, Rizky Ghifari, Natasha Winona, Dinda Asti dan Levana Sonia yang telah menjadi teman pertama selama di Kuliah.
7. Terimakasih kepada Andreas Wijaya dan juga Adam yang telah menjadi teman *perwibuan* penulis. Terimakasih sudah mau menemani penulis untuk datang ke berbagai acara Jepang dan mau turut memotivasi saya untuk membeli figur *Anime*.
8. Terimakasih kepada Evelyn Thesia yang juga menjadi teman baik penulis walau baru bertemu sekali. Terimakasih telah mau mendengar curhatan penulis walau jauh di UK. Terimakasih selalu mengingatkan saya supaya tidak keduluan lulusnya dan terimakasih telah menjadi pendengar yang baik.
9. Terimakasih kepada Natasha Winona yang menjadi teman penulis dari awal berkuliah dan memberi saran mengenai banyak hal dalam Skripsi. Terimakasih juga Via Vero yang menjadi teman bercerita penulis setiap hari.

Terimakasih untuk Antania Anya yang juga menjadi pendengar yang baik bagi penulis. Terimakasih sudah menjadi kakak online penulis.

10. Terima Kasih Scholastika Santa dan Bonifasius Raditya Adidarma karena telah menjadi saudara gaming. Menemani keseharian saya dengan bermain *Genshin Impact*, *Fifa*, *Overcooked* dan game lainnya.
11. Terimakasih kepada teman teman komunitas *Nendoroid* di *Instagram*. Penulis berterimakasih ke setiap dari mereka yang menjadi *followers* akun *ImpulsiveMickey*.
12. Terimakasih untuk teman bermain *futsal* dan sepak bola yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena terlalu banyak. Terima kasih telah membantu saya menurunkan berat badan dan juga menjadi manusia yang sehat jasmani.
13. Terimakasih juga kepada tim sepakbola terbaik di dunia, Manchester City yang telah memenangkan *Champions League* dan juga meraih *Treble Winner* sehingga penulis memiliki moral yang tinggi saat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	7
1.2.1 DESKRIPSI MASALAH.....	7
1.2.2 PEMBATAAN MASALAH.....	11
1.2.3. PERUMUSAN MASALAH.....	12
1.3 KAJIAN LITERATUR .....	12
1.4 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	18
1.4.1 TUJUAN PENELITIAN.....	18
1.4.2 KEGUNAAN PENELITIAN.....	18
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN.....	19
1.6 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	28
1.6.1 METODE PENELITIAN .....	28
1.6.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	29
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	29
<b>BAB 2 .....</b>	<b>31</b>
<b>PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN TENAGA KERJA ASING DI JEPANG.....</b>	<b>31</b>
2.1. BUDAYA KETENAGAKERJAAN JEPANG.....	33
2.1. DINAMIKA DEMOGRAFI KEPENDUDUKAN JEPANG DAN DAMPAK TERHADAP EKONOMI .....	36
2.1.2. ANGKA KELAHIRAN JEPANG DAN PROYEKSI KETERSEDIAAN ANGKATAN TENAGA KERJA JEPANG.....	39
2.2 SEGMENTASE PASAR TENAGA KERJA ASING DI JEPANG .....	43
2.3 PROGRAM KETENAGAKERJAAN UNTUK TENAGA ASING JEPANG SEBELUM SPECIFIED SKILLED WORKERS .....	46
2.3.1 KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ASING DALAM PROGRAM TITP .....	49
<b>BAB 3 .....</b>	<b>54</b>
<b>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA ASING DI JEPANG MELALUI PROGRAM SPECIFIED SKILLED WORKERS .....</b>	<b>54</b>
3.1 KERANGKA KERJA PROGRAM SPECIFIED SKILLED WORKERS .....	54
3.2. PROSES PENGEMBANGAN PROGRAM SPECIFIED SKILLED WORKERS.....	58
3.2.1. FAKTOR INTERNAL KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI LEVEL DOMESTIK. ....	62
3.2.2. Tekanan dari Kelompok Pengusaha dan Industri Untuk Mendatangkan Pekerja Terampil. ....	64
3.2.3. Tekanan Politik Domestik dan Kalangan Masyarakat Konservatif dan Partai Konservatif .....	67
3.2.4. Tekanan Eksternal Negara Pengirim Tenaga Kerja Mengenai Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang .....	68
3.3. PENERAPAN PROGRAM SPECIFIED SKILLED WORKERS .....	71
3.3.1. Implementasi Program Specified Skilled Workers di Tiga Sektor Ekonomi Domestik.....	73
3.3.2. Sistematiika Pengiriman Tenaga Kerja Asing dalam Program Specified Skilled Workers .....	77

3.3.3. <i>Program Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang dalam Program Specified Skilled Workers</i>	82
3.4. PERBANDINGAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN DALAM PROGRAM TITP DENGAN PROGRAM SSW	86
3.5. PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ASING JEPANG MELALUI PROGRAM SSW	88
<b>BAB 4</b>	<b>93</b>
<b>KESIMPULAN</b>	<b>93</b>
<b>5. DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>97</b>

## **Daftar Grafik**

Tabel 1.1: Matrix Institutional Change: <i>Processes and Results</i> .....	<b>21</b>
Tabel 2.1: Perbedaan TITP, SSW (i) dan SSW (ii).....	<b>53</b>
Tabel 3.1: Flow Chart Perbandingan Proses Pengiriman Program SSW dan TITP.....	<b>76</b>
Tabel 3.2: Prosedur Pengiriman Tenaga Kerja Asing Program SSW Berdasarkan Setiap Negara.....	<b>78</b>
Tabel 3.3: Tabel Perbandingan Indikator Sosial TITP dan SSW.....	<b>86</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia Ke 2, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dan menjadikan mereka negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia pada periode 1960-1980. Pertumbuhan ekonomi ini didapatkan Jepang melalui bantuan yang diberikan Amerika Serikat berupa revitalisasi infrastruktur ekonomi beserta alat produksi serta memperkenalkan Jepang ke market global untuk membantu Jepang memperbaiki ekonomi mereka.<sup>1</sup> Berbagai bentuk Investasi di berbagai industri terlebih alat produksi dan teknologi elektronik beserta reformasi ekonomi yang dilakukan ekonomi Jepang juga menjadi alasan dibalik berkembangnya ekonomi di Jepang. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Jepang setiap tahun mencapai 12.9% pada tahun 1968. Pada masa itu juga, Jepang mendapatkan status sebagai negara industri maju.<sup>2</sup> Penobatan ini membuat Jepang dianggap sebagai episentrum Asia dalam hal ekonomi, bisnis hingga politik. Periode ini dikenal sebagai *Japan's Economic Revival* oleh para akademisi.<sup>3</sup>

Namun, pada tahun 1970-1980 pertumbuhan ekonomi Jepang tumbuh terlalu cepat dan menyebabkan inflasi berlebih. Inflasi berlebih ini membuat ekonomi Jepang

---

<sup>1</sup> Orr, R. C. (2004). In *Winning the peace: An American strategy for post-conflict reconstruction* (p. 183). essay, CSIS Press.

<sup>2</sup> Eiji, O. (2015). Japan's 1968: A Collective Reaction to Rapid Economic Growth in an Age of Turmoil . *The Asia Pacific Journal*, 13(12). Retrieved from <https://apjif.org/2015/13/11/Oguma-Eiji/4300.html>.

<sup>3</sup> Eiji, O. (2015)

berada di fase *Bubble* yaitu dimana harga asset berupa rumah dan saham melambung tinggi dikarenakan kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Nasional Jepang.<sup>4</sup> Pada tahun 1992, *Bubble* tersebut pecah sehingga ekonomi Jepang mengalami perlambatan, stagnansi dan semakin lama semakin menuju fase deflasi. Periode ini dikenal juga dengan periode 失われた10年 [*Ushinawareta Jūnen*] yang dapat diartikan sebagai *The Lost Decade*. Pecahnya gelembung ekonomi ini diawali oleh kebijakan moneter ekspansif yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Jepang untuk menstimulasi ekonomi Jepang. Kebijakan ekspansif yang dilakukan Jepang berupa mempermudah pinjaman bank untuk pembelian asset berupa rumah, infrastruktur dan tanah yang menciptakan adanya pinjaman kredit berlebih.<sup>5</sup> Dengan mempermudah pinjaman, pemerintah Jepang beserta Bank Of Japan berharap ekonomi Jepang akan lebih cepat pulih dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai setelah perang dan dibarengi juga oleh ambisi untuk mengejar dan mengalahkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Namun kebijakan ini digunakan oleh Bank swasta untuk dapat memanfaatkan keuntungan dari bunga bank yang ditentukan sehingga tidak ada kontrol mengenai jumlah pinjaman yang berjalan.<sup>6</sup> Banyaknya jumlah pinjaman kredit dibarengi dengan ekonomi Jepang yang sedang mengalami pertumbuhan cepat dan tingkat inflasi yang tinggi setiap tahun, membuat kreditor mengalami gagal bayar.<sup>7</sup>

Pecahnya *Bubble* ekonomi Jepang berujung pada berubahnya tatanan ekonomi dan juga kehidupan masyarakat dan pekerja Jepang. Lemahnya pertumbuhan ekonomi Jepang dan stagnansi yang timbul memiliki dampak langsung

---

<sup>4</sup> Werner, R. A. (2002). Monetary policy implementation in Japan: What they say versus what they do. *Asian Economic Journal*, 16(2), 111–151. <https://doi.org/10.1111/1467-8381.00145>

<sup>5</sup> Werner, R. A. (2002)

<sup>6</sup> Werner, R. A. (2002)

<sup>7</sup> Werner, R. A. (2002)

terhadap berubahnya sistem ketenagakerjaan di level bisnis & industri, socioekonomi dan perilaku masyarakat Jepang terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pada dasarnya terdapat dua faktor yang membuat terciptanya reformasi besar sistem ketenagakerjaan Jepang setelah pecahnya gelembung ekonomi Jepang. Faktor pertama yaitu, berbagai Industri dan bisnis Jepang menerapkan sebuah praktik ketenagakerjaan dimana para pelaku bisnis dan industri akan menjanjikan untuk memberikan pekerjaan namun dengan kontrak jangka panjang. Praktik ini dinamakan *shūshin koyō system*, or "permanent employment". Hal ini berdampak terhadap kehidupan sehari-hari para pekerja di Jepang. Tenaga kerja di Jepang dituntut untuk bekerja dengan jam kerja dan tekanan yang tinggi dimana para pekerja tidak memiliki kehidupan diluar lingkungan kerja mereka dan sulit mendapatkan pasangan dan hidup normal diluar lingkungan kerja.

Faktor kedua adalah tingginya biaya hidup dan tanggung jawab ekonomi. Biaya hidup juga yang menjadi dasar dari krisis demografi yang dimulai dari tingginya kebutuhan pokok, biaya membeli rumah maupun sewa rumah, tingginya biaya pendidikan dan tingginya biaya kesehatan membuat perkawinan dan pernikahan menjadi tidak menarik di mata anak muda. Hal inilah yang membuat angka kelahiran dan fertilitas di Jepang rendah, menyebabkan demografi yang semakin menua. Maka dari itu, untuk menunjang dan mempertahankan ekonomi mereka, Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk dapat mengisi kekosongan tenaga kerja produktif di berbagai industri.<sup>8</sup>

Alasan Jepang membuka pintu imigrasi bagi para pekerja migran didasari oleh permasalahan yang cukup serius mengenai angkatan kerja dan kondisi

---

<sup>8</sup> Kambayashi, R., & Kato, T. (2010). The Japanese employment system after The bubble burst: New evidence. *Japan's Bubble, Deflation, and Long-Term Stagnation*, 217–262. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262014892.003.0007>

ketenagakerjaan mereka. Jepang adalah negara dengan memiliki demografi ‘*Super-aged Society*’ yang berarti Jepang didominasi oleh populasi tua ketimbang populasi muda. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyusutan populasi di Jepang akibat kecilnya angka kelahiran dan tingginya harapan hidup populasi Jepang yang diekspektasikan mencapai umur 85 tahun.<sup>9</sup> Angka kelahiran di Jepang pada tahun 2019 menurut Menurut World Bank ada di angka 1.36 per perempuan bila dibandingkan dengan Indonesia yang pada tahun yang sama memiliki angka 2.28 per perempuan.<sup>10</sup> Kecilnya angka kelahiran berpengaruh terhadap ekspektasi jumlah angkatan kerja Jepang yang secara signifikan menurun setiap tahunnya dan berada di fase *labour shortage*. Saat ini, *Labour shortage* dan permasalahan demografi yang dialami Jepang sudah mulai mengancam ketersediaan tenaga kerja spesialis yang dibutuhkan banyak industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Permasalahan kependudukan ini membuat pemerintah Jepang juga harus meningkatkan kekhawatiran mereka ketenagakerjaan berputar pada jumlah pekerja terampil dan mempertahankan jumlah produksi.<sup>11</sup>

Masalah ini mendorong pemerintah Jepang untuk mencari strategi lain untuk mendapatkan pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar. Pada akhirnya Jepang membentuk program dan skema kerjasama ketenagakerjaan dengan negara lain dibawah kerjasama ekonomi lainnya. Kerjasama ketenagakerjaan ini menghasilkan sebuah program ketenagakerjaan pertama yaitu program magang untuk mahasiswa atau murid vokasional bernama *Technical Intern Training Program*

---

<sup>9</sup> WorldBank, *Population ages 65 and above per 2022*, WorldBank Online database  
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?locations=JP>

<sup>10</sup> Jozuka, E., Yeung, J., & Kwon, J. (2019, December 30). *Japan's birth rate hits another record low in 2019*. CNN. <https://edition.cnn.com/2019/12/25/asia/japan-birthrate-hnk-intl/index.html>

<sup>11</sup> D'Ambrogio, E. (2020). *Japan's Ageing Society*. *European Parliament Research Service: Continental Democracies*.  
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659419/EPRS\\_BRI\(2020\)659419\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659419/EPRS_BRI(2020)659419_EN.pdf)

(*Gaikokujin Ginō Jisshū Seido*) atau TITP yang dimulai pada tahun 1993.<sup>12</sup> Namun baru sampai 2017 TTIP menjadi sumber tenaga kerja asing yang stabil untuk Jepang. Hal ini terjadi karena adanya pembaruan mengenai durasi tinggal bagi pemegang yang lulus test sertifikasi yang awalnya hanya 3 tahun menjadi 5 tahun.<sup>13</sup> Selain itu terdapat program lain bernama Japan Internship Programme (*Kokusai-sokushin Intanshippu Jigyō*) atau JPI yang diperkenalkan pada tahun 2016. Program ini sendiri fokus untuk dapat memberikan pengalaman bagi peserta magang dengan bekerja pada industri yang spesifik dan sesuai dengan keahlian peserta. JPI cenderung lebih banyak mengincar peserta magang dengan kemampuan yang lebih terampil dan punya kemampuan spesifik.

Namun, dalam pelaksanaan kedua program tersebut banyak kasus yang menunjukkan bahwa kesejahteraan para pekerja asing tidak terjamin. Spekulasi sendiri datang dari masyarakat Jepang yang melihat bahwa program magang dan pelatihan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang hanya digunakan oleh perusahaan kecil-menengah untuk dapat mendatangkan pekerja migran yang murah dan tidak seperti yang diharapkan yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai teknologi produksi canggih yang ada di industri Jepang.<sup>14</sup> Menurut lembaga non-pemerintah untuk perlindungan tenaga kerja asing melaporkan juga terjadinya tindak diskriminasi yang berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM dan hak pekerja yang dilakukan pelaku bisnis di Jepang.<sup>15</sup> Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Jepang pada tahun 2019, terdapat 759 kasus laporan yang diterima dimana tenaga kerja asing mendapatkan tindakan kekerasan, diskriminasi

---

<sup>12</sup> Nawawi. (2010). Working In Japan as a Trainee: The Reality of Indonesian Trainees Under Japan's Industrial Training and Technical Internship Program. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 5(2).

<https://doi.org/https://ejournal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/103/94>

<sup>13</sup> Nawawi. (2010)

<sup>14</sup> Nawawi. (2010)

<sup>15</sup> Nawawi. (2010)

dan bahkan tidak dibayar upahnya oleh perusahaan yang secara langsung telah mengancam kesejahteraannya tenaga kerja asing tersebut.<sup>16</sup>

Mengambil contoh paling baru mengenai pekerja magang Vietnam di Jepang yang mendapatkan kekerasan dan diskriminasi oleh tenaga lokal selama dua tahun bekerja sejak 2019 sampai 2021. Pekerja Vietnam ini dipukul dan beberapa kali mendapatkan kekerasan dari rekan kerjanya yang adalah tenaga lokal. Pekerja magang Vietnam tersebut beberapa kali terluka hingga patah tulang rusuk akibat kekerasan yang diterima dari rekan kerjanya.<sup>17</sup> Selain itu perusahaan yang memperkerjakan pekerja magang Vietnam tersebut juga turut menutupi kasus tersebut dengan kedok bahwa sang pekerja magang Vietnam ini mengalami kecelakaan saat bekerja dan tidak menghiraukan kekerasan yang diterima oleh pekerja magang Vietnam tersebut. Hingga akhirnya pekerja magang Vietnam tersebut mengadu ke serikat buruh untuk tenaga asing di Jepang untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.<sup>18</sup> Kasus ini sendiri tidak sekali dua kali terjadi di Jepang dan menimpa banyak pekerja magang asing yang berada di Jepang. Sehingga tak hanya kekerasan namun adanya diskriminasi yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja asing juga menjadi masalah dan tantangan dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja asing di Jepang.

Permasalahan ini juga diperparah dari masih adanya bentuk penolakan dari masyarakat lokal yang konservatif, mereka beranggapan bahwa keberadaan tenaga kerja asing dengan jumlah besar di Jepang dapat merubah keberlangsungan sosial dan

---

<sup>16</sup> Osumi, M. (2019, March 29). Probe reveals 759 cases of suspected abuse and 171 deaths of foreign trainees in Japan. *The Japan Times*. Retrieved December 9, 2022, from <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/29/national/probe-reveals-759-cases-suspected-abuse-foreign-trainees-japan-171-deaths/>

<sup>17</sup> The Asahi Shimbun. (2022, January 18). *Vietnamese trainee endured 2 years of physical abuse: The Asahi Shimbun: Breaking News, Japan news and analysis*. Retrieved December 9, 2022, from <https://www.asahi.com/ajw/articles/14524587>

<sup>18</sup> The Asahi Shimbun. (2022, January 18)

mengancam kebudayaan yang telah terbentuk sedari lama. Selain itu, masyarakat yang konservatif juga berlindung dibalik delik lain yaitu pekerja asing yang datang akan mengambil porsi pekerjaan yang bisa diberikan ke tenaga kerja lokal.<sup>19</sup> Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari banyak negara dan juga pekerja asing yang ingin bekerja di Jepang mengenai kesejahteraan para tenaga kerja asing disana. Sehingga keberadaan program Specified Skilled Workers menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang. Terlebih mengenai masalah kesejahteraan yang dapat mengancam tenaga kerja asing yang bekerja disana. Disini pemerintah Jepang juga diuji dari bagaimana mereka merespon mengenai permasalahan kesejahteraan ini dan bagaimana mereka membenahi dan lebih melindungi pekerja asing di Jepang melalui program Specified Skilled Workers ini.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen ekonomi yang dapat merepresentasikan kualitas ekonomi suatu negara dengan melihat tingkat penyerapan angkatan kerja yang tersedia di dalam ekonomi tersebut. Dalam pandangan makroekonomi, kualitas ketenagakerjaan beserta jumlah tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi serta produktivitas pekerja. Sehingga, ketenagakerjaan dalam makro ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara yang akan direpresentasikan melalui laporan tahunan Produk Domestik Bruto negara. Keterkaitan ketenagakerjaan dengan pertumbuhan ekonomi membuat

---

<sup>19</sup> Foster, M., & Takenaka, K. (2018, June 15). *Demand for foreign workers may soften Japan's immigration rules*. Reuters. <https://jp.reuters.com/article/us-japan-immigration-idUSKBN1JB05H>

Ketenagakerjaan menjadi agenda yang penting bagi sebuah negara untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, Labour shortage yang dimiliki Jepang akan berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan manufaktur mereka, yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap PDB mereka serta mengganggu pertumbuhan ekonomi mereka. Dikutip dari *Japan Productivity Center* Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OECD pada tahun 2020, produktivitas pekerja per kapita per jam pada tahun 2019 berada pada \$46.8 per jam atau mengalami penurunan dari level 65% menjadi 60% bila dibandingkan produktivitas Amerika Serikat. Angka tersebut membuat Jepang berada di urutan terbawah dalam G7 dan ke 21 diantar negara OECD lainnya.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan adanya kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam ekonomi Jepang karena permasalahan kebijakan dan program ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang terus melemah, dikarenakan ekspor dan konsumsi domestik yang menurun.<sup>22</sup> Terlebih kondisi ekonomi mereka yang terus dalam fase terdeflasi dalam beberapa dekade terakhir menimbulkan *spiral effect* yang membuat penduduk Jepang akan lebih mengurangi konsumsi. Selain itu penduduk Jepang juga jadi tidak ingin menikah dan tidak ingin memiliki anak lebih dari satu karena faktor ekonomi. Sehingga potensi angkatan kerja Jepang di masa depan juga terancam.<sup>23</sup>

Untuk dapat memperbaiki permasalahan ini pemerintah Jepang membentuk program dan kebijakan baru dalam bentuk program ketenagakerjaan yang berfokus

---

<sup>20</sup> Topel, R. (1999). Chapter 44 labour Markets and Economic Growth. *Handbook of labour Economics*, 2943–2984. [https://doi.org/10.1016/s1573-4463\(99\)30035-3](https://doi.org/10.1016/s1573-4463(99)30035-3)

<sup>21</sup> Author, N. (2019, December 19). *Japan's labour productivity still lowest among G7 members in 2018*. The Japan Times. Retrieved December 2022, from <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/19/business/japan-labour-productivity-still-lowest-in-g7/>

<sup>22</sup> Author, N. (2019, December 19)

<sup>23</sup> Leussink, D. (2019, July 29). *Japan says GDP growth could slow to 0.9% on weakening global demand*. Reuters. Retrieved 2021, from <https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-gdp-idUSKCN1UO0U8>.

pada tenaga kerja asing. Terdapat dua program yang sedang berjalan bersamaan yaitu program *Trainee Intern Training Program (TITP)* dan *Specified Skilled Workers (SSW)*. Namun dalam implementasinya program TITP dikenal memiliki beberapa permasalahan dalam hal perlindungan ketenagakerjaan. Maka dari itu pada tahun 2019 program *Specified Skilled Workers* ini menjadi sorotan. Ditakutkan masihnya ada isu yang berputar pada lemahnya kebijakan ketenagakerjaan yang melingkupi penanganan masalah lingkungan kerja yang lebih ramah terhadap pekerja asing dan strategi kerjasama dengan negara lain agar dapat menarik lebih banyak pekerja asing dengan keterampilan tertentu untuk datang bekerja di Jepang.

Pada dasarnya program *Specified Skilled Workers* di bentuk pemerintah Jepang karena masih kurangnya jumlah pekerja asing, yang dapat menolong ekonomi Jepang. Program TITP sendiri memiliki 324,940 orang tenaga kerja asing. Menurut analis bisnis dan ekonomi Jepang, jumlah ini masih kurang. Maka dari itu program SSW yang membrikan visa kepada 47,550 pekerja migran pada tahun pertama dan total 345,000 visa pekerja untuk 5 tahun kedepan dikeluarkan pemerintah. Namun, beberapa ahli Bisnis dan ekonomi menganggap untuk menuju ekonomi berkelanjutan jumlah ini masih dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan industri domestik.<sup>24</sup> Selain itu ada dorongan dari pengusaha dan pelaku bisnis yang mengatakan bahwa industri di Jepang saat ini ada pada fase kritis dimana produktivitas ditakutkan tidak lagi mencapai tingkat efisiensi yang diinginkan. Isu ini mendorong banyak perempuan dan juga pensiunan untuk kembali ditarik bekerja karena kebutuhan Industri dan Bisnis yang kesulitan dalam mengisi kekosongan tenaga kerja di berbagai sektor.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ryall, J. (2019, April 10). *Japan's new visa regulation opens door to foreign labour: DW: 10.04.2019*. DW.COM. Diakses pada October 30, 2021, dari <https://p.dw.com/p/3GXu6>.

<sup>25</sup> Ryall, J. (2019, April 10)

Isu lain yang menjadi fokus dari banyak negara terhadap program Specified Skilled Workers ini adalah mengenai perlindungan tenaga kerja dan budaya kerja yang ada di Jepang. Jepang sendiri dikenal memiliki budaya kerja yang cukup ekstrim dan cenderung diskriminatif terhadap pekerja asing. Walau Jepang memiliki landasan yang memiliki prinsip anti-diskriminasi namun penjelasannya masih dianggap terlalu longgar dan sangat mudah untuk dilanggar. Isu ini juga sangat diperhatikan karena status pekerja dalam program Specified Skilled Workers ini yang dapat dikategorikan sebagai pekerja lepas tanpa kontrak tetap (*Non-Regular*) yang didatangkan dari negara lain melalui agensi terafiliasi. Untuk dapat melaksanakan program Specified Skilled Workers ini, Jepang harus berusaha untuk meyakini negara lain mengenai perlindungan tenaga kerja mereka dan membentuk regulasi yang lebih ketat mengenai diskriminasi dalam lingkungan kerja terlebih oleh perusahaan swasta.<sup>26</sup>

Isu ketenagakerjaan ini mendorong pemangku kebijakan Jepang untuk menerbitkan sebuah kebijakan dan program yang dapat memberi waktu bagi Jepang untuk membenahi permasalahan populasi mereka sekaligus memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan dengan instan. Program dan kebijakan ini juga dapat memberikan kepastian bagi para industri di Jepang agar dapat mempekerjakan tenaga kerja yang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan para industri Jepang. Pada dasarnya program *Specified Skilled Workers* berfokus pada ingin meningkatkan jumlah tenaga kerja asing ke Jepang. Namun, dengan semakin besarnya jumlah angkatan kerja yang bekerja di Jepang, kesejahteraan para pekerja asing ini juga dipertanyakan.

---

<sup>26</sup> Tominaga, K. (2018). A Legal Study on Equal or Balanced Treatment for Regular and Non-Regular Workers in Japan. *Japan labour Issues*, 2(5), 3–18.

Dengan cukup maraknya kejadian diskriminasi yang diterima oleh tenaga asing di Jepang dan dengan budaya kerja Jepang yang terkenal ekstrim. Pemangku kebijakan Jepang juga harus membentuk program yang dapat menjamin kesejahteraan program *Specified Skilled Workers* dan jumlah tenaga asing yang bekerja di Jepang untuk dapat meningkatkan daya tarik untuk tinggal dan bekerja di Jepang dalam jangka waktu yang lama. Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing di Jepang juga akan membuat ada *pressure group* baru yaitu kelompok buruh yang berisikan tenaga kerja asing yang dapat mempengaruhi kebijakan buruh dan imigrasi Jepang. Sehingga, program *Specified Skilled Workers* bisa menjadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan tenaga kerja asing di Jepang atau menjadi katalis baru untuk permasalahan diskriminasi dan kesejahteraan asing tenaga kerja asing .

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dari beberapa permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka topik penelitian ini akan dikerucutkan kedalam satu permasalahan, yaitu bagaimana Pemerintah Jepang melalui kebijakan *Specified Skilled Workers* yang diterapkan pada tahun 2019 dapat memaksimalkan Kerjasama Ketenagakerjaan ini dan dapat menjamin kesejahteraan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Jepang. Penelitian ini sendiri akan dibataskan sampai akhir tahun 2022 atau 3 tahun setelah diterapkannya program *Specified Skilled Workers* ini. Penelitian ini sendiri penulis batasi hingga akhir tahun 2022, dikarenakan pada awal tahun 2023 muncul sebuah wacana dimana program Technical Internship Trainee Programme atau TITP akan di hentikan pemerintah Jepang. Hal ini sebagai bentuk untuk meningkatkan jumlah partisipan program SSW. SSW ini sendiri dilaksanakan di Jepang dengan menggandeng beberapa negara sebagai mitra pengiriman tenaga kerjanya Selain menjelaskan

mengenai apa itu program *Specified Skilled Workers* penelitian ini juga akan melihat alasan dibalik dibentuknya program *Specified Skilled Workers* ini dan melihat bagaimana perubahan arah kebijakan ini dapat meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja asing di Jepang tanpa mengorbankan kebudayaan sosioekonomi warga lokal Jepang. Penulis juga ingin melihat dampak apa saja yang timbul dari diterapkannya program ini dan bagaimana program ini akan mempengaruhi keberlangsungan ekonomi Jepang serta kebijakan mengenai lingkungan kerja Jepang untuk melindungi tenaga kerja asing.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Keputusan Jepang untuk membentuk program *Specified Skilled Workers* cukup menarik untuk dibahas terlebih apabila dibahas melalui kaca mata kesejahteraan tenaga kerja asing dan pengaruhnya setelah program ini dilaksanakan pada tahun 2019. Maka dari itu timbul pertanyaan penelitian **Bagaimana Pengaruh Program Specified Skilled Workers dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang?**

### **1.3 Kajian Literatur**

Untuk dapat lebih memahami alasan dibalik pembentukan kebijakan luar negeri Jepang dalam program ketenagakerjaan dan permasalahan serta rintangan yang harus dihadapi para pembentuk kebijakan dalam mencapai kepentingan nasional sekaligus menjamin kesejahteraan tenaga kerja asing di Jepang, maka beberapa jurnal ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memahami kasus ini lebih dalam.

David. E. Bloom dan Jocelyn E. Finlay dalam artikel literturnya yang berjudul *Demographic Change and Economic Growth in Asia* (September 2008)<sup>27</sup> menjelaskan korelasi mengenai perubahan demografi di suatu negara dengan perkembangan ekonomi negara-negara di Asia. Dalam penelitian ini Bloom dan Finlay ingin fokus melihat bagaimana faktor transisi demografi menjadi salah satu faktor dibalik pertumbuhan ekonomi negara dengan melalui analisis berdasarkan metode regresi. Bloom dan Finlay berfokus pada tiga wilayah Asia, yaitu Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara yang setiap wilayah tersebut memiliki kondisi demografi dan ekonomi yang berbeda. Dijelaskan oleh Bloom dan Finlay Asia Timur yang memiliki ekonomi yang lebih dewasa memiliki demografi dengan populasi tua lebih besar daripada populasi muda. Asia Timur memiliki populasi pekerja yang menua dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah dan memiliki angka kematian yang juga rendah. Asia Selatan dan Asia Tenggara ada pada puncak fase *population boom* dimana tingkat kelahiran sedang ada di fase puncak maupun stagnan menuju penurunan. Namun, Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki populasi dengan umur bekerja yang banyak sehingga menunjang produktivitas yang jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara di wilayah Asia Timur.

Melalui model regresi beserta grafik regresi yang dilakukan, Bloom dan Finlay dapat mengkonklusikan bahwa demografi dan ekonomi memiliki korelasi yang kuat di ketiga wilayah Asia yang dipilih terlebih di Asia Timur. Klaim ini dijelaskan oleh Bloom dan Finlay dengan melakukan konstruksi data mengenai pendapatan pekerja dari setiap negara di ketiga wilayah dimulai dari tahun 1960 sampai 2005 dengan jeda data per lima tahun. Data tersebut disandingkan dengan

---

<sup>27</sup> Bloom, D. E., Canning, D., & Finlay, J. E. (2008). Population aging and economic growth in Asia. *The Economic Consequences of Demographic Change in East Asia*, 61–89. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226386881.003.0003>

data demografi lainnya yang berisikan data mengenai angka distribusi umur kerja, angka harapan hidup, pertumbuhna populasi dan kepadatan penduduk.

Bloom dan Finlay melalui model regresi lebih tertarik untuk membahas wilayah Asia Timur untuk mencontohkan fase apa saja yang mungkin akan terjadi kepada wilayah Asia lainnya. Dengan menggunakan Asia Timur sebagai contoh Bloom dan Finlay menggaris bawahi satu kesamaan yaitu, pertumbuhan ekonomi negara merupakan representasi langsung dari seberapa banyak populasi usia bekerja/produktif di suatu negara. Melalui kasus Jepang pada tahun 1990-2005 dengan menurunnya populasi usia bekerja/produktif dan demografi yang menua, pertumbuhan ekonomi Jepang menjadi stagnan dan pertumbuhan ekonomi terus menurun. Sedangkan melalui Kasus Tiongkok dan Korea Selatan, pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah populasi angkatan kerja/produktif berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Pada kasus Tiongkok dan Korea Selatan pertumbuhan Jumlah penduduk berkontribusi pada 26% dan 29% pertumbuhan ekonomi negara. Melalui penelitian ini Bloom dan Finlay juga memberikan pendapatnya mengenai pendekatan melalui program maupun kebijakan yang bersifat menstimulasi fertilitas, melakukan pemotongan jumlah uang penerimaan para pensiunan dan juga merelaksasi kebijakan migrasi antar negara apabila suatu negara mengalami penurunan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja produktif.

Melengkapi argumen Bloom dan Finlay mengenai relaksasi kebijakan migrasi, Philip Martin dan Gottfried Zürcher dalam artikel literturnya yang berjudul **Managing Migration: The Global Challenge** yang dipublikasikan oleh

*Population Reference Bureau* (2008)<sup>28</sup> membahas bagaimana faktor demografi dan semakin terbukanya kebijakan mengenai migrasi internasional menjadi alasan terbesar dibalik semakin meningkatnya migrasi pekerja dari suatu negara ke negara lain. Kebanyakan pekerja migran berasal dari negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi. Karena jumlah populasi di negara berkembang yang lebih besar dan kemungkinan migrasi pekerja yang lebih masif, munculah sedikit ketakutan bagi negara destinasi migran, yang kebanyakan adalah negara maju, karena akan sangat berdampak terhadap sosial-ekonomi mereka dalam jangka panjang apabila tidak terkontrol.

Martin dan Zürcher menjelaskan terdapat beberapa alasan umum dibalik fenomena angkatan kerja di negara berkembang yang memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan menjadi pekerja migran di negara lain. (1) Lebih banyaknya Ketersediaan lapangan kerja dengan upah tinggi di negara maju (2) Adanya permintaan yang besar dari negara maju untuk mendapatkan pekerja berketerampilan rendah dengan upah yang sangat rendah (3) Adanya keinginan untuk membawa keluarganya tinggal di negara dengan kualitas hidup yang lebih baik.

Martin dan Zürcher juga menjelaskan bagaimana globalisasi menjadi hal lain yang membuat pekerja migran menjadi lebih mudah untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Globalisasi membuat negara menjalin hubungan yang lebih dekat dengan satu sama lain terlebih pada bidang imigrasi dan ketenagakerjaan. Globalisasi membuat perpindahan tenaga kerja lebih cepat karena memungkinkan adanya pertukaran pekerja, rekrutmen lintas negara dan juga adanya sistem magang bagi mahasiswa. Namun globalisasi juga menyebabkan permasalahan seperti meningkatnya angka imigran ilegal, kejahatan lintas batas negara dan perpindahan

---

<sup>28</sup> Martin, P. L., & Zürcher Gottfried. (2008). *Managing migration: The global challenge* (Vol. 63, Ser. 1). A Publication of the Population Reference Bureau.

angkatan kerja berketerampilan rendah masuk ke negara dengan rata-rata pekerja berketerampilan tinggi yang dapat menimbulkan peningkatan tingkat pengangguran karena kalah bersaing. Selain itu perpindahan pekerja migran juga tidak akan memberikan dampak signifikan ke negara asal migran, karena kemungkinan besar angkatan kerja yang memiliki keterampilan tinggi malah meninggalkan negaranya untuk bekerja di negara lain.

Ayumi Takenaka dalam artikel jurnalnya yang berjudul **Demographic Challenges for the 21<sup>st</sup> Century: Population Ageing and the Immigration “Problem” in Japan (2012)**<sup>29</sup> mencoba untuk menjelaskan tantangan yang dimiliki Jepang dalam menangani kondisi *Ageing Population* mereka melalui kebijakan imigrasi mereka. Ayumi menggunakan konsep Keterbukaan untuk menjelaskan permasalahan yang berputar mengenai imigrasi di Jepang. Ayumi pada dasarnya menjelaskan bahwa kebijakan imigrasi untuk bekerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang masih terlalu tertutup bagi pekerja migran dari negara lain, sehingga upaya yang dilakukan terkesan tidak maksimal dan cenderung kontradiktif dengan outcomes yang diinginkan oleh pemerintah Jepang.

Kebijakan imigrasi Jepang yang cenderung untuk memberlakukan kuota dan membatasi jumlah pekerja migran menjadi salah satu permasalahan yang ditunjukkan oleh Ayumi. Menurut Ayumi masalah ini dilatarbelakangi oleh kepentingan pemerintah Jepang dalam menjaga identitas kultural sosial Jepang dimana pemerintah Jepang masih ingin menjaga etnis dan kultur sosial mereka agar tetap *homogeneous* dan tidak banyak terpengaruh dengan kultur dari luar Jepang.

Walau demikian, Dalam artikel ini Ayumi menjelaskan bahwa sejak 2008, pemerintah Jepang mulai sedikit terbuka untuk pekerja migran berketerampilan tinggi

---

<sup>29</sup> Takenaka, A. (2012). Demographic challenges for the 21st Century: Population Ageing and the immigration “problem” in Japan. *Anthropology & Aging*, 33(2), 38–43. <https://doi.org/10.5195/aa.2012.52>

dan khusus (High Skilled & Specialise Workers), terlebih dalam bidang keperawatan, untuk dapat bekerja di Jepang dengan jangka waktu tertentu. Terlebih dengan beberapa Kerjasama Bilateral yang dilakukan Pemerintah Jepang, lebih banyak sektor yang menerima tenaga kerja migran dengan keterampilan tinggi dan khusus.

Namun Ayumi berargumen bahwa dibalik keterbukaan dan meningkatnya penerimaan pekerja migran ke Jepang, kebijakan imigrasi 'setengah-setengah' yang ditawarkan pemerintah Jepang hanya bersifat sementara dalam menanggulangi permasalahan *Ageing Population* di Jepang. Hal ini terjadi karena Pemerintah Jepang yang kurang mampu untuk meyakinkan dan mempertahankan tenaga kerja migran untuk bertahan dan melanjutkan hidup di Jepang.

Literatur-literatur yang telah dijelaskan diatas banyak menjelaskan mengenai alasan migrasi tenaga kerja dan menjelaskan bagaimana migrasi tersebut di dominasi perpindahan tenaga kerja dari negara berkembang ke negara yang lebih maju secara ekonomi dan sosial. Namun belum ada yang sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana proses migrasi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan para tenaga asing yang bermigrasi ke negara lain. Mark J. Miller hanya menjelaskan bagaimana semakin maraknya keberadaan tenaga kerja asing di sebuah ekonomi dapat mendorong adanya dorongan sosial baru yang secara langsung dapat mempengaruhi politik dan kebijakan sosial ekonomi sebuah negara, terlebih dalam hal program kesejahteraan bagi tenaga kerja migran/asing. Disini penulis ingin mengisi kekosongan penelitian yang dapat menjelaskan bagaimana program ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga asing di suatu negara.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat alasan dibentuknya program *Specified Skilled Workers* dan bagaimana program tersebut digunakan sebagai alat/strategi bagi pemerintah Jepang untuk dapat menjamin kesejahteraan para Tenaga Kerja Asing terampil yang datang ke Jepang dan bagaimana program ini juga memberikan keuntungan lain diluar kesempatan kerja di Jepang yang menjadi daya tarik bagi pekerja asing.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran deskriptif mengenai faktor-faktor apa saja yang harus dirubah oleh pemerintah Jepang untuk dapat mengakomodir perubahan kebijakan ketenagakerjaan dengan penerapan program *Specified Skilled Workers*. Penulis berharap dapat memberikan penjelasan yang rinci mengenai faktor apa saja yang dapat menghambat penerapan program *Specified Skilled Workers* dan bagaimana Jepang dapat memaksimalkan penyerapan tenaga kerja asing melalui kerangka-kerangka kerjasama ekonomi yang telah dibangun bersama dengan negara mitra ekonomi mereka. Penulis juga ingin menggaris bawahi keuntungan yang akan didapatkan negara-negara yang setuju untuk berpartisipasi dalam program *Specified Skilled Workers* ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca mengenai hubungan ketenagakerjaan Jepang dengan negara lain dan kepentingan negara dibalik hubungan ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan Ketenagakerjaan Jepang dalam

sektor ketenagakerjaan dan bagaimana mereka menyiasati produktivitas melalui penyerapan tenaga asing.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sebuah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian yang hendak akan dijawab dan sebagai panduan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dengan pertanyaan penelitian **“Bagaimana Pengaruh Program Specified Skilled Workers dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang?”**

Penulis ingin memaparkan bagaimana Jepang dapat memaksimalkan program Specified Skilled Workers dan bagaimana kesejahteraan tenaga kerja asing penting dalam berjalannya program SSW ini. Dari situ penulis juga dapat melihat bagaimana program kesejahteraan yang dibuat mampu memikat jumlah tenaga asing untuk bekerja di Jepang dengan meningkatkan program kesempatan kerja dan kesejahteraan pekerja asing. Sehingga dapat membantu Jepang dalam mempertahankan maupun meningkatkan produktivitas ekonomi domestik mereka.

Pada awalnya kita harus memahami kenapa kesejahteraan tenaga kerja adalah salah satu konsep terpenting untuk dibahas dan kenapa ini menjadi sebuah isu yang dianggap penting bagi banyak negara. Untuk membahas itu, penulis akan menggunakan teori Hubungan Internasional yaitu, *Critical Theory*. *Critical Theory* adalah sebuah teori yang membicarakan mengenai pendekatan *Counter Positive* yang awalnya mempengaruhi ajaran Marxist Frankfurt. *Critical Theory* percaya bahwa pemikiran positivist itu sudah terdistorsi cara pemikirannya. Pemikiran positivist terlalu berfokus pada standar scientific untuk menjawab isu sosial, sehingga *Critical Theory* ingin meluruskan bahwa untuk membahas isu sosial penelitian secara

scientific tidak bisa diandalkan. Banyak dimensi yang harus dibahas terlebih dahulu.<sup>30</sup>

Salah satu pemikiran *Critical Theory* yang akan digunakan adalah *Critical Theory* Andrew Linklater yang juga memperkenalkan konsep *World Citizens*. Dalam tulisannya, Andrew menjelaskan bahwa isu sosial yang ada di dunia internasional berputar pada tiga hal yaitu, *Problem of Community*, *Problem of Citizenship* dan *Problem of Harm*. *Problem of Community* menjelaskan dimana kita sebagai warga dunia mempunyai obligasi moral yang diemban untuk dapat menyelesaikan permasalahan dunia. *Problem of Citizenship* adalah adanya konsep Kedaulatan (*Sovereignty*) malah membuat manusia kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan global. *Problem of Citizenship* membuat adanya pengecualian, ketidakadilan dan ketidaknyamanan. Sedangkan *Problem of Harm* melihat bahwa kejahatan sekarang tidak hanya kejahatan yang bersifat tradisional seperti perang, namun juga banyak kejahatan yang lebih luas dan mempengaruhi sampai ke level sosial.<sup>31</sup>

Dari penggunaan *Critical Theory* Andrew Linklater, kesejahteraan tenaga kerja asing dapat dibahas. Pada dasarnya kesejahteraan berhubungan langsung dengan Hak pekerja dan Hak mereka sebagai manusia. Disini keperluan dan hak mendasar manusia haruslah terpenuhi untuk dapat menjamin adanya kesejahteraan. Namun banyak kasus dimana ketika seorang warga negara berpindah dari satu negara berdaulat ke negara berdaulat lainnya untuk bekerja, Hak mereka sebagai manusia dan warga negara tidak di akui di negara yang dia kunjungi. Adanya bentuk diskriminasi secara mental dan bahkan fisik sering terjadi. Dalam hal ketenagakerjaan, pekerja yang pindah untuk sementara atau selamanya untuk bekerja

---

<sup>30</sup> Linklater, A. (2007). *Critical theory*. In *International Relations Theory for the Twenty-First Century* (pp. 57-69). Routledge.

<sup>31</sup> Burchill, S., Linklater, A., Donnelly, J., Nardin, T., Paterson, M., Reus-Smit, C., ... & Sajed, A. (2022). *Theories of international relations*. Bloomsbury Publishing.

terkadang tidak dilindungi oleh pemerintah setempat, sehingga mereka sering mendapatkan perlakuan tidak seenaknya. Beberapa contoh adalah tidak diberi, jam kerja yang tidak sesuai dan tidak manusiawi, beban kerja yang berlebihan bahkan hingga kekerasan.

Hal ini dilakukan karena adanya *favouritism* atau pilih kasih yang dilakukan agar mendahului orang atau pekerja lokal terlebih dahulu. Ini menjadi bukti dari *Problem of Citizenship* yang dimana bila identitas berbeda maka kemungkinan besar akan ada perbedaan dalam perlakuan karena adanya pilih kasih. Ini juga menjadi bukti bahwa *Problem of Harm* yaitu kejahatan non tradisional pun ada dalam bentuk diskriminasi dalam lingkup ketenagakerjaan. Karena kasus ketenagakerjaan yang dibahas merupakan ketenagakerjaan lintas batas negara, maka *Problem of Community* dari isu ini adalah bagaimana warga dunia melihat bahwa ada kecacatan moral yang terjadi di berbagai negara dan menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat melindungi satu sama lain sebagai manusia.

Untuk menjelaskan sebuah peningkatan dalam kebijakan ketenagakerjaan yang membahas mengenai kesejahteraan akan digunakan sebuah konsep bernama *Institutional Change*. Konsep ini membahas mengenai bagaimana perubahan dalam suatu konstitusi dapat mempengaruhi bagaimana interaksi dan perkembangan kehidupan sosial di suatu tempat atau negara. Pada dasarnya konsep ini juga menjelaskan tergantung seberapa besar dan cepat perubahan ini dilakukan dapat mempengaruhi bagaimana interaksi dan kehidupan sosial kelompok sosial tersebut. Dalam kasus ekonomi, penggunaan *Institutional Change* membahas mengenai regulasi dan kebijakan yang berdampak langsung terhadap aspek-aspek ekonomi dan kepada masyarakat sebagai entitas yang merasakan perubahan. Maka dari itu,

penelitian harus melihat seberapa besar atau banyak perubahan yang terjadi untuk melihat tingkat peningkatan yang direspon oleh masyarakat.<sup>32</sup>

**Tabel 1.1: Matrix Institutional Change: *Processes and Results*.**

		Results of Change	
		Continuity	Discontinuity
Process of Change	Incremental	Reproduction by Adaptation	Gradual Transformation
	Abrupt	Survival and Return	Breakdown and Replacement

Sumber: Streeck W., & Thelen, K.<sup>33</sup>

Untuk melakukan analisa menggunakan *Institutional Change*, dibutuhkan matrix yang dinamakan *Processes and results*. Matrix ini sendiri memiliki beberapa bagian, pada bagian tabel horizontal terdapat bagian *Process of Change* yang akan menjadi indikator mengenai bagaimana proses perubahan yang terjadi dalam bentuk perubahan institusi, kehidupan sosial maupun dalam perubahan kebijakan. Dalam *Process of Change* terdapat dua jenis perubahan yaitu *Incremental* (perlahan) dan *Abrupt* (mendadak). *Incremental* bisa dicontohkan sebagai sebuah perubahan sosial ataupun kebijakan yang terbentuk secara perlahan dan progresif, contohnya berupa perubahan dalam kebijakan kemiskinan, dimana setiap tahun akan disesuaikan berdasarkan data perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan *Abrupt* merupakan perubahan mendadak yang berdampak secara langsung, dapat dicontohkan sebagai kebijakan embargo yang akan secara langsung mempengaruhi persediaan dan juga harga barang di pasar.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Streeck, W., & Thelen, K. (2005). Introduction: institutional change in advanced political economies. In W. Streeck, & K. Thelen (Eds.), *Beyond continuity: institutional change in advanced political economies* (pp. 1-39). Oxford et al.: Univ. Press. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ss0ar-194981>

<sup>33</sup> Streeck, W., & Thelen, K. (2005).

<sup>34</sup> Streeck, W., & Thelen, K. (2005).

Sedangkan pada bagian tabel vertikal terdapat *Results of Change* yang menjelaskan hasil dari perubahan yang terjadi di dalam sebuah institusi, lingkungan sosial ataupun kebijakan. Dalam *Results of Change* terdapat dua bagian yaitu *Continuity* (Keberlangsungan) dan *Discontinuity* (Terhenti). *Continuity* merupakan kondisi dimana proses perubahan yang terjadi menciptakan kondisi keberlanjutan dan perubahan tersebut tidak menghambat perubahan. Sedangkan untuk *Discontinuity*, perubahan yang terjadi menghambat hasil dari perubahan atau malah melumpuhkan struktur yang terjadi sehingga perubahan yang terjadi tidak bisa berkembang lagi.<sup>35</sup>

Matrix ini digunakan untuk melihat apabila proses perubahannya (*Process of Change*) berubah secara perlahan (*Incremental*) dan menghasilkan keberlanjutan (*Continuity*) artinya akan tercipta bentuk adaptasi (*Reproduction by Adaptation*) yang dirasakan oleh kelompok sosial tersebut. Namun apabila proses perubahannya dilakukan secara cepat dan dipaksa (*Abrupt*) dan menghasilkan keberlanjutan, artinya akan ada perubahan sosial yang besar dan kemungkinan besar akan terjadi pergejolakan sosial, yang pada akhirnya hanya yang kuat yang bertahan (*Survival and Return*). *Survival and Return* dapat dicontohkan sebagai reformasi negara. Lalu perubahan secara perlahan yang kemudian terhenti (*Discontinuity*) menciptakan transformasi (*Gradual Transformation*). Sedangkan perubahan yang mendadak yang terhenti akan menciptakan gangguan yang harus segera dirubah kembali (*Breakdown and Replacement*).<sup>36</sup>

Berdasarkan pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini, penelitian akan lebih banyak melihat pada kolom *Continuity* dikarenakan program SSW ini masih berjalan. Program SSW ini baru berjalan selama 3 tahun dan tidak ada tanda untuk diberhentikan, yang artinya ada *Continuity*. Namun, perlu dilihat apakah

---

<sup>35</sup> Streeck, W., & Thelen, K. (2005).

<sup>36</sup> Streeck, W., & Thelen, K. (2005).

program ini mengalami perubahan yang *Abrupt* atau *Incremental* dalam hal kebijakan ketenagakerjaan yang menyangkut kesejahteraan tenaga kerja asing di Jepang. Dari sini dapat dilihat apakah sebenarnya program ini meningkatkan secara besar atau tidak dalam hal program kesejahteraan mereka. Selain itu, harus dilihat apakah program SSW ini juga memiliki transisi yang mulus dari program sebelumnya yaitu TITP. Walau pada dasarnya sama-sama merupakan program ketenagakerjaan, namun memiliki implementasi yang cukup berbeda.

Berdasarkan penjabaran masalah yang sudah dijelaskan, terdapat keterkaitan kerjasama lintas negara yang mencakup kepentingan politik dan ekonomi negara *host* yaitu Jepang dan negara *source* yaitu mitra kerjasama Jepang melalui sektor ketenagakerjaan. Masalah ini dapat dibahas melalui perspektif paradigma *International Political Economy* (IPE) dan dengan teori *Orthodox Economic Liberals* (OEL) atau juga dikenal dengan *Neoclassical Economics*. IPE sendiri merupakan sebuah paradigma dalam Ilmu Hubungan Internasional yang membahas mengenai interaksi antar negara yang memiliki oleh dimensi politik dan juga dimensi ekonomi untuk memnuhi kepentingan suatu negara.<sup>37</sup> Sedangkan OEL merupakan teori yang membahas mengenai bagaimana respon manusia ketika dihadapkan dengan konsep kelangkaan atau *scarcity*.<sup>38</sup>

Dalam kasus ketenagakerjaan Jepang, OEL dapat menjelaskan bagaimana kelangkaan tenaga kerja, memaksa pemerintah Jepang untuk membuka lebar pintu imigrasi untuk pekerja asing. Pada dasarnya, OEL percaya bahwa pekerja migran adalah bagian dari sistem pasar bebas atau *free-market system* yang artinya pekerja sebagai faktor produksi harus dapat bergerak secara bebas dari suatu negara ke

---

<sup>37</sup> Balaam, D. N., & Dillman, B. L. (2019). What Is International Political Economy. In *Introduction to international political economy* (pp. 8-9). essay, Routledge.

<sup>38</sup> Balaam, D. N., & Dillman, B. L. (2019). (pp. 417)

negara lain dalam sistem pasar bebas.<sup>39</sup> Keberadaan tenaga kerja asing di pasar bebas dianggap OEL mampu untuk membantu negara dengan tenaga kerja yang terbatas dan mahal untuk tetap dapat melakukan aktivitas ekonomi dan produksi secara efisien dan efektif.<sup>40</sup> OEL memberi kesempatan penulis untuk dapat menjelaskan program *Specified Skilled Workers* sebagai salah satu strategi Jepang dalam memaksimalkan pasar tenaga kerja global untuk memenuhi kebutuhan salah satu faktor produksi mereka, yaitu tenaga kerja.

Teori lain dibawah pemahaman Neoclassical yang akan digunakan untuk membahas faktor kesejahteraan adalah *Labour Market Theory*. Pada dasarnya teori ini membahas mengenai alokasi tenaga kerja dan bagaimana pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai tenaga kerja.<sup>41</sup> Nilai tenaga kerja ini direpresentasikan dalam bentuk upah. *Labour Market Theory* juga dapat menjadi basis dari permasalahan tenaga kerja seperti pengangguran, kemiskinan dan juga diskriminasi. Penulis akan lebih banyak menggunakan teori *Neoclassical Labour Market Theory* untuk membahas permasalahan kesejahteraan tenaga kerja. Menurut *Neoclassical* dalam pasar tenaga kerja yang modern dibutuhkan sebuah kebijakan yang dapat menjamin tenaga kerja untuk tidak didiskriminasi atas dasar apapun terlepas dari pendidikan, jenis kelamin, suku, agama dan ras. *Neoclassical* menggunakan *Manpower Policies* sebagai landasan dari argumen mereka mengenai pentingnya melindungi hak dan kesejahteraan tenaga kerja karena memiliki keterkaitan terhadap produktivitas, efisiensi dan kinerja tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi.<sup>42</sup> *Labour market Theory* sendiri

---

<sup>39</sup> Balaam, D. N., & Dillman, B. L. (2019). (pp 417.)

<sup>40</sup> Balaam, D. N., & Dillman, B. L. (2019). (pp 417.)

<sup>41</sup> McNabb, R. (1987). Labour market theories and education. *Economics of Education*, 157–163.

<https://doi.org/10.1016/b978-0-08-033379-3.50031-0>

<sup>42</sup> McNabb, R. (1987)

memiliki alternatif pemahaman lain diluar pemahaman Neoclassical seperti yaitu *Segmented-labour Market Theory* yang juga akan digunakan oleh penulis.

*Segmented labour Market Theory* lebih banyak menjelaskan darimana permintaan (Demand) akan pekerja dan dari mana pasokan (Supply) pekerja beserta motivasi dibalik keinginan para tenaga kerja tersebut untuk bekerja di negara lain dengan upah yang menurut mereka sesuai. *Segmented labour Market Theory* juga menjelaskan mengenai faktor Push dan Pull yang mempengaruhi *demand* dan *supply* dari pekerja migran. *Pull-Push factors labour Model* yang dapat menjelaskan alasan dibalik proses peningkatan migrasi pekerja dari suatu negara ke negara lain. Everett Li Menjelaskan bahwa banyak faktor yang dapat menarik tenaga kerja untuk bermigrasi ke negara lain (*Demand-Pull Factors*) dan faktor yang mendorong tenaga kerja untuk bekerja di negara lain (*Supply-Push Factors*).<sup>43</sup> *Demand-Pull Factors* biasanya dimiliki oleh negara yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi atau dapat dikategorikan sebagai negara maju. Sedangkan *Supply-Push Factors* biasanya dimiliki negara yang mempunyai tingkat pendapatan yang rendah dan pengangguran yang tinggi atau negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang.<sup>44</sup> <sup>45</sup> Namun teori ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan alasan terjadinya permasalahan kesejahteraan mendasar mengenai ketenagakerjaan seperti diskriminasi, pengangguran dan juga kemiskinan.

Migran dari negara berkembang cenderung untuk memilih bekerja di negara yang lebih maju, dikarenakan faktor ekonomi domestik yang lebih buruk maupun adanya dorongan dari aktor negara seperti pemerintah dan industri untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja mereka. Sedangkan, negara

---

<sup>43</sup> Lee, E.S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, 3(1), 47-57.

<sup>44</sup> *Ibid*, Lee

<sup>45</sup> Gurieva, L. K., & Dzhiyev, A. V. (2015). Economic theories of labour migration. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s7p101>

maju memiliki kekuatan untuk menarik tenaga kerja migran karena faktor ekonomi yang lebih maju sehingga memungkinkan adanya pendapatan yang lebih tinggi, tingkat keamanan yang lebih terjamin, akses yang lebih baik kepada pasar tenaga kerja (terlebih untuk pekerja migran ilegal), dan juga faktor lain seperti kultur dan serikat pekerja. Walaupun konsep ini berputar pada alasan ekonomi individu, namun alasan non-ekonomi lain yang lebih personal juga dapat mendorong peningkatan pekerja migran untuk bekerja di negara lain.<sup>46</sup>

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai kesejahteraan (*well-being*) tersebut, definisi kesejahteraan yang lebih luas atau *welfare* haruslah dijelaskan terlebih dahulu. Kesejahteraan atau *Welfare* adalah sebuah konsep sosial dan ekonomi yang tidak mudah untuk didefinisikan karena bersifat multidimensional. Namun secara garis besar menjelaskan mengenai seberapa besar upaya seorang individu untuk dapat mengakses kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan, kebutuhan jasmani, psikologis, dan rohani dengan penggunaan alat seperti uang.<sup>47</sup> Idealnya kesejahteraan harus dapat diakses oleh individu dengan upaya yang tidak terlalu sulit dan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Dalam konteks ekonomi, kesejahteraan mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan pendapatan dan akses terhadap uang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan dalam ekonomi identik dengan distribusi pendapatan yang merata dan kecilnya margin dalam ketimpangan pendapatan.<sup>48</sup> Kesejahteraan dalam artian '*Well-being*' adalah bagian kecil dari *Welfare*. *Well-being*

---

<sup>46</sup> Massey, D. S. (2015) Migration, Theory of. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 466–471. doi:10.1016/b978-0-08-097086-8.31119-9

<sup>47</sup> Greeve, B. (2008). What is Welfare. *Central European Journal of Public Policy*, (1), 50–73. <https://doi.org/https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=170432>

<sup>48</sup> Greeve, B. (2008).

juga mencakup bagaimana individu merasa nyaman untuk hidup dalam suatu lingkungan dan terpenuhi secara finansial dan juga secara psikologis.<sup>49</sup>

Pada dasarnya untuk lebih dapat melihat bentuk dari kesejahteraan terdapat dua indikator yang dapat digunakan, yaitu indikator sosial dan indikator psikologis. Indikator Sosial berfokus pada sesuatu yang dapat didapatkan, seperti nutrisi, rumah, pendidikan, kesehatan, kualitas lingkungan hidup dan lingkungan kerja, kejahatan dan juga kemiskinan. Namun juga ada bentuk lain berupa *Freedom of movement*, *Freedom of expression* dan juga *Freedom of political organisation*. Untuk indikator psikologis sendiri biasanya lebih bersifat subjektif dan relatif. Indikator psikologis cenderung berfokus pada pengalaman yang dirasakan individu dalam korelasinya terhadap hal materialistik (dalam hal ini indikator sosial) yang dimiliki oleh individu. Indikator psikologis mencakup seperti rasa puas dan senang, kecewa dan sedih serta bentuk perasaan lainnya. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah Indikator sosial dengan tujuan untuk melihat lebih luas mengenai Indikator-indikator kesejahteraan apa saja yang sudah ada pada penerapan TITP dan perbandingannya terhadap program SSW yang lebih baru.<sup>50</sup>

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dan juga Perbandingan. Metode penelitian Kualitatif menurut John W. Creswell adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan

---

<sup>49</sup> Greeve, B. (2008)

<sup>50</sup> Offer, A. (2000). *Economic Welfare Measurements and Human Well-Being*. Nuffield College (University of Oxford). <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:c9dae321-0e7c-4390-9671-5580c5087d23>

memahami makna, proses dan konteks sebuah perilaku atau interaksi sosial.<sup>51</sup> Unit analisis dalam penelitian ini adalah program SSW terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang yang dibandingkan dengan unit analisis lainnya yaitu program TITP. Perbandingan digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan program kesejahteraan yang terjadi dan sejauh mana perubahan ini berdampak terhadap aspek kesejahteraan tenaga kerja asing, lingkungan sosial dan ketertarikan program SSW itu sendiri.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini akan mengandalkan data-data sekunder kualitatif yang bersifat non-numerik, sehingga penelitian ini akan banyak mengandalkan proses studi teks. Teks yang dimaksud berupa buku, dokumen resmi, publikasi dan studi terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan kebijakan ketenagakerjaan Jepang yang menyangkut mengenai hal kesejahteraan terlebih program kesejahteraan dalam *Specified Skilled Workers*, kebijakan luar negeri mengenai ketenagakerjaan, dokumen perjanjian *Economic Partnership Agreement* dalam hal ketenagakerjaan dan dokumen yang berhubungan dengan program *Specified Skilled Workers*.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat (4) bab. Bab I akan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, kajian literatur, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>51</sup> Chih-Pei, H. U., & Chang, Y. Y. (2017). John W. Creswell, research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Journal of Social and Administrative Sciences*, 4(2), 205-207.

Selanjutnya di Bab II akan membahas mengenai Demografi Jepang dan Inisiasi Pemerintah Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan. Bab II akan dibagi menjadi beberapa Bab yang akan banyak membahas keadaan Demografi Jepang, dan membahas mengenai kesejahteraan Tenaga Kerja Asing di Jepang. Bab II akan membahas mengenai budaya ketenagakerjaan di Jepang, dinamika demografi Jepang beserta dengan bagaimana demografi tersebut mempengaruhi jumlah tenaga kerja di Jepang. Bab II juga akan membahas mengenai program ketenagakerjaan tenaga kerja asing lainnya sebelum *Specified Skilled Workers* yaitu Technical Internship Trainee Program (TITP) beserta dengan kesejahteraan tenaga kerja asing dibawah program TITP. Bab III akan membahas mengenai Implementasi *Specified Skilled Workers* yang berawal dari tahun 2019, membahas mengenai *pressure group* yang mempengaruhi arah kebijakan dan program kesejahteraan pada pengembangan program SSW. Diikuti oleh implementasi kebijakan, sistematik pengiriman tenaga kerja, perbandingan program ketenagakerjaan SSW dan TITP dalam indikator kesejahteraan dan program kesejahteraan yang diberikan, serta menjawab pertanyaan penelitian bagaimana dan apakah ada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja asing Jepang melalui program SSW. Pada bab IV akan menjadi bab terakhir dalam penelitian ini yang juga akan berisikan kesimpulan jawaban dari pertanyaan penelitian.